

**LAPORAN PROJECT BASED TRAINING
DATA ANALYTIC FOR AUDIT
BATCH II**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SE-WILAYAH PROVINSI MALUKU**

**Oleh
MUHAMMAD THAIBI
KELAS A**

BAB I

Data Umum Objek Pengawasan

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Sektor : 3-Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Tema : 10-Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah

Topik : 41-Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah

KAP : 119-Pengawasan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah

PKPT : 2582-Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

B. Identifikasi Obyek Pengawasan

Objek Pengawasan adalah pemerintah daerah se-Wilayah Provinsi Maluku yang terdiri dari:

1. Pemda Provinsi Maluku
2. Pemda Kota Tual
3. Pemda Kabupaten Maluku Tengah
4. Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Pemda Kabupaten Buru
7. Pemda Kabupaten Buru Selatan
8. Kota Tual
9. Pemda Kabupaten Maluku Tenggara
10. Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya
11. Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar
12. Pemda Kabupaten Kepulauan Aru

C. Matrik Desain Pengawasan

MATRIK DESAIN PENGAWASAN				
Unit Rendal		: Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		
Topik		: Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		
Periode Pengawasan		: 2022		
Tujuan Pengawasan		: Memberi gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja		
Informasi APP		: 1. Analisis Keuangan dengan pendekatan arah pencapaian tujuan pemerintah		
No	Pertanyaan Audit	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan
1	2	3	4	5
1	Apakah alokasi belanja pemerintah daerah digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan pemerintah berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan menurunnya angka kemiskinan ?	1. LKPD 2018-2020 Komponen LKPD yang dianalisis adalah Neraca dan LRA 2. Data Makro 2019-2020: a. PDRB b. IPM c. Jumlah penduduk d. Jumlah penduduk miskin	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Pengolahan Data	1. Analisis Rasio Belanja terhadap PDRB 2. Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Tingkat Kemiskinan 3. Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Jumlah penduduk
Informasi APP		: 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		
No	Pertanyaan Audit	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan
1	2	4	5	6
1	Bagaimana gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemerintah daerah?	1. LKPD 2018-2020 Komponen LKPD yang dianalisis adalah Neraca dan LRA 2. Data Makro 2019-2020: a. PDRB b. Jumlah penduduk	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Pengolahan Data	1. Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020, berupa: a. Rasio Total pendapatan daerah per Kapita b. Rasio Tingkat Kemandirian daerah c. Rasio Pajak dan Retribusi daerah terhadap PDRB d. Rasio Kemampuan mendanai belanja dan pengeluaran daerah e. Rasio Belanja Modal f. Rasio Belanja Pegawai g. Rasio Optimalisasi SILPA e. Rasio Kemampuan Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek 2. Analisis Tren Petumbuhan Pos Neraca dan LRA, berupa: a. Total Aset b. Aset tetap c. Total Kewajiban d. Total Pendapatan e. PAD f. Pendapatan Transfer g. Total Belanja h. Belanja Operasi i. Belanja Pegawai

BAB II

Kegiatan Analisis Data

A. Kegiatan Analisis Data

1. Analisis Keuangan dengan Pendekatan Arah Pencapaian Tujuan Pemerintah

Analisis keuangan ini merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ekonomi suatu pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pada kegiatan yang dianggap prioritas termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan capaian indikator-indikator makro ekonomi. Analisis keuangan dengan pendekatan arah pencapaian tujuan pemerintah diukur dengan menggunakan indikator makro ekonomi seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan indeks pemabangunan manusia serta menurunnya angka kemiskinan. Pencapaian tujuan pemda tersebut secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh alokasi belanja pemerintah. Untuk memperoleh gambaran mengenai alokasi belanja pemerintah yang dikaitkan dengan tujuan pemerintah mana digunakan analisis berikut:

a. Analisis Rasio Belanja terhadap PDRB

Analisis ini dilakukan dengan mengitung seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio belanja terhadap PDRB tahun 2019 dan 2020 dengan rumus:

Rasio Belanja Terhadap PDRB 2018	=	$\frac{\text{Total Belanja Tahun 2018}}{\text{PDRB Tahun 2018}}$
Rasio Belanja Terhadap PDRB 2019	=	$\frac{\text{Total Belanja Tahun 2019}}{\text{PDRB Tahun 2019}}$
Rasio Belanja Terhadap PDRB 2020	=	$\frac{\text{Total Belanja Tahun 2020}}{\text{PDRB Tahun 2020}}$

Jika rasio belanja terhadap PDRB semakin besar, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut semakin bergantung pada belanja daerah.

b. Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Tingkat Kemiskinan

Analisis ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengitung seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan. Analisis ini dilakukan dengan mengitung rasio penggunaan belanja nonpegawai terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2020 dengan rasio sebagai berikut:

Rasio Belanja Nonpegawai Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2020	=	$\frac{\text{Total Belanja Tahun 2020} - \text{Belanja Pegawai Tahun 2020}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020}}$
---	---	--

- 2) Setalahnya, perhitungan rasio diatas, akan dibandingkan dengan pertumbuhan total belanja nonpegawai dan pertumbuhan jumlah penduduk miskin tahun 2020 dengan rumus:

Pertumbuhan Belanja Nonpegawai Tahun 2020	=	$\frac{(\text{Total Belanja Tahun 2020} - \text{Belanja Pegawai Tahun 2020}) - (\text{Total Belanja Tahun 2019} - \text{Belanja Pegawai tahun 2019})}{\text{Total Belanja Tahun 2019} - \text{Belanja Pegawai Tahun 2019}}$
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020	=	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020} - \text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019}}$

Hasilnya apakah rasio belanja nonpegawai terhadap tingkat kemiskinan tahun 2020 sejalan atau berkolerasi dengan pertumbuhan belanja nonpegawai tahun 2020 dan penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2020.

c. Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Jumlah Penduduk

Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Jumlah Penduduk ini dilakukan untuk mendapatkan informasi seberapa besar belanja

pemerintah daerah nonpegawai per penduduk. Analisis ini dilakukan dengan melakukan perbandingan rasio belanja nonpegawai per jumlah penduduk pada tahun 2020 antar daerah dengan kategori IPM yang sama dengan rumus:

Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020	=	$\frac{\text{Total Belanja Tahun 2020} - \text{Belanja Pegawai Tahun 2020}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun 2020}}$
--	---	---

Hasilnya digunakan untuk menilai dalam suatu kelompok kategori IPM yang sama, pemerintah daerah mana yang alokasi belanja per penduduknya paling kecil sehingga mengindikasikan efisiensi dalam belanja pemerintah.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk memperoleh gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rasio kinerja keuangan akan dibahas jenis rasio yaitu:

a. Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kondisi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Rasio Total Pendapatan Daerah per Kapita Tahun 2020

Rasio ini membandingkan antara jumlah seluruh pendapatan daerah terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah, rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Total Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	=	$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah Tahun 2020}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun 2020}}$
--	---	---

Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar juga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

2) Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2020

Rasio ini membandingkan antara jumlah seluruh PAD dengan total pendapatan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2020	=	Total PAD Tahun 2020
		Jumlah Total Pendapatan Daerah Tahun 2020

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin baik.

3) Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Tahun 2020

Potensi penerimaan pajak daerah dapat tercermin dari besarnya PDRB dari masing-masing daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020	=	(Penerimaan Pajak Daerah + Retribusi Daerah) Tahun 2020
		PDRB Tahun 2020

Semakin besar rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB, maka kemampuan daerah dalam mengoversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar.

4) Rasio Kemampuan Mendanai Belanja dan Pengeluaran Daerah Tahun 2020

Rasio ini menunjukkan kondisi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah baik belanja, transfer, maupun pengeluaran pembiayaan daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Tahun 2020	=	(Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan) Tahun 2020
		(Total Belanja dan Transfer + Pengeluaran Pembiayaan) Tahun 2020

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah terhadap belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka kemampuan untuk membiayai belanja daerah semakin besar.

5) Rasio Belanja Modal Tahun 2020

Belanja modal yang besar diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi pelayanan pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal Tahun 2020	=	$\frac{\text{Belanja Modal Tahun 2020}}{\text{Total Belanja Tahun 2020}}$
-----------------------------------	---	---

6) Rasio Belanja Pegawai Tahun 2020

Indikator atas kualitas belanja yang baik juga ditunjukkan oleh semakin kecilnya rasio belanja pegawai terhadap total belanja. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Belanja Pegawai Tahun 2020	=	$\frac{\text{Belanja Pegawai Tahun 2020}}{\text{Total Belanja Tahun 2020}}$
-------------------------------------	---	---

Semakin kecil rasio ini maka menunjukkan kualitas belanja yang lebih baik karena akan dialokasikan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang langsung terkait dengan pelayanan publik.

7) Rasio Optimalisasi SiLPA Tahun 2020

Jika SiLPA mampu dimanfaatkan untuk belanja tahun berjalan, maka dapat mengindikasikan bahwa daerah mampu mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Optimalisasi SiLPA Tahun 2020	=	$\frac{\text{SiLPA Tahun Sebelumnya Tahun 2020}}{\text{Total Belanja Tahun 2020}}$
--	---	--

Semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga semakin besar.

8) Rasio Kemampuan Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui proporsi pembayaran kewajiban jangka pendek dalam satu periode. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat melunasi kewajiban pendeknya. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Kemampuan Pembayaran Kewajiban Jk Pendek Tahun 2020	=	$\frac{\text{Kewajiban JangkaPendek Tahun 2020}}{\text{Kas dan Setara Kas Tahun2020}}$
--	---	--

Semakin kecil rasio pembayaran kewajiban jangka pendek terhadap kas dan setara kas, maka daerah semakin mampu untuk menjamin pengembalian utang jangka pendeknya.

b. Rasio Perumbuhan Neraca dan LRA Tahun 2018-2020

1) Analisis atas Neraca

a) Total Aset

Analisis tingkat pertumbuhan total aset bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai aset pemda selama tiga periode berurutan. Kenaikan aset menunjukkan adanya kemajuan atau pertumbuhan aset. Penurunan aset bisa menandakan adanya kemunduran, penurunan nilai aset, ataupun inefisiensi dalam pengelolaan aset. Nilai yang digunakan untuk analisis adalah nilai buku yaitu nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyisihan, akumulasi penyusutan, dan akumulasi amortisasi.

Pertumbuhan Total Aset 2019	=	$\frac{\text{Total Aset TA 2019} - \text{TotalAset TA 2018}}{\text{Total Aset TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Total Aset 2020	=	$\frac{\text{Total Aset TA 2020} - \text{TotalAset TA 2019}}{\text{Total Aset TA 2019}}$	x 100%

b) Aset Tetap

Analisis tingkat pertumbuhan aset tetap bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai buku aset tetap pemda selama tiga periode berurutan. Kenaikan nilai aset tetap antara lain menunjukkan adanya penambahan aset tetap dan atau adanya revaluasi aset tetap.

Penurunan nilai aset tetap antara lain menunjukkan adanya penyusutan aset tetap dan pelepasan aset tetap berupa penjualan atau penghapusan aset tetap.

Pertumbuhan Aset Tetap 2019	=	$\frac{\text{Aset Tetap TA 2019} - \text{Aset Tetap TA 2018}}{\text{Aset Tetap TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Aset Tetap 2020	=	$\frac{\text{Aset Tetap TA 2020} - \text{Aset Tetap TA 2019}}{\text{Aset Tetap TA 2019}}$	x 100%

c) Total Kewajiban

Analisis tingkat pertumbuhan total kewajiban bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai kewajiban pemda selama tiga periode berurutan. Kenaikan nilai kewajiban antara lain menunjukkan adanya penambahan utang atau timbulnya utang yang baru. Penurunan nilai kewajiban menunjukkan adanya pelunasan atau penghapusan utang. Informasi tingkat fluktuasi kewajiban bisa digunakan untuk perencanaan dan pengendalian utang agar tidak mengganggu keuangan daerah.

Pertumbuhan Total Kewajiban 2019	=	$\frac{\text{Total Kewajiban TA 2019} - \text{Total Kewajiban TA 2018}}{\text{Total Kewajiban TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Total Kewajiban 2020	=	$\frac{\text{Total Kewajiban TA 2020} - \text{Total Kewajiban TA 2019}}{\text{Total Kewajiban TA 2019}}$	x 100%

2) Analisis atas LRA

a) Total Pendapatan

Analisis tingkat pertumbuhan total pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi total pendapatan bertumbuh secara positif atau negatif. Fluktuasi total pendapatan antara lain disebabkan faktor intern yaitu kurangnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional. Rumus perhitungan fluktuasi total pendapatan adalah:

Pertumbuhan Total Pendapatan 2019	=	$\frac{\text{Total Pendapatan TA 2019} - \text{Total Pendapatan TA 2018}}{\text{Total Pendapatan TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Total Pendapatan 2020	=	$\frac{\text{Total Pendapatan TA 2020} - \text{Total Pendapatan TA 2019}}{\text{Total Pendapatan TA 2019}}$	x 100%

b) PAD

Analisis tingkat pertumbuhan PAD bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi PAD bertumbuh secara positif atau negatif. Fluktuasi PAD antara lain disebabkan faktor intern yaitu kurangnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, dan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan PAD 2019	=	$\frac{\text{PAD TA 2019} - \text{PAD TA 2018}}{\text{PAD TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan PAD 2020	=	$\frac{\text{PAD TA 2020} - \text{PAD TA 2019}}{\text{PAD TA 2019}}$	x 100%

c) Pendapatan Transfer

Analisis tingkat pertumbuhan pendapatan transfer bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi pendapatan transfer bertumbuh secara positif dan negatif. Idealnya terjadi kenaikan realisasi pendapatan transfer dan tahun ke tahun, namun bisa terjadi penurunan yang umumnya disebabkan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

Pertumbuhan Pendapatan Transfer 2019	=	$\frac{\text{Pendapatan Transfer TA 2019} - \text{Pendapatan Transfer TA 2018}}{\text{Pendapatan Transfer TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Pendapatan Transfer 2020	=	$\frac{\text{Pendapatan Transfer TA 2020} - \text{Pendapatan Transfer TA 2019}}{\text{Pendapatan Transfer TA 2019}}$	x 100%

d) Total Belanja

Analisis tingkat pertumbuhan total belanja bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran pemda. Fluktuasi total belanja dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jenis-jenis belanja antara lain belanja operasi dan belanja modal. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan Total Belanja 2019	=	$\frac{\text{Total Belanja TA 2019} - \text{Total Belanja TA 2018}}{\text{Total Belanja TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Total Belanja 2020	=	$\frac{\text{Total Belanja TA 2020} - \text{Total Belanja TA 2019}}{\text{Total Belanja TA 2019}}$	x 100%

e) Belanja Operasi

Analisis tingkat pertumbuhan belanja operasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran pemda untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan Belanja Operasi 2019	=	$\frac{\text{Belanja Operasi TA 2019} - \text{Belanja Operasi TA 2018}}{\text{Belanja Operasi TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Belanja Operasi 2020	=	$\frac{\text{Belanja Operasi TA 2020} - \text{Belanja Operasi TA 2019}}{\text{Belanja Operasi TA 2019}}$	x 100%

f) Belanja Pegawai

Analisis tingkat pertumbuhan belanja pegawai bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran pemda atas belanja pegawai. Pertumbuhan belanja pegawai antara lain dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, kenaikan besaran gaji/honor dan lain-lain. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan Belanja Pegawai 2019	=	$\frac{\text{Belanja Pegawai TA 2019} - \text{Belanja Pegawai TA 2018}}{\text{Belanja Pegawai TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Belanja Pegawai 2020	=	$\frac{\text{Belanja Pegawai TA 2020} - \text{Belanja Pegawai TA 2019}}{\text{Belanja Pegawai TA 2019}}$	x 100%

g) Belanja Bantuan Sosial

Analisis tingkat pertumbuhan belanja bantuan sosial bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran pemda atas belanja bantuan sosial. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial 2019	=	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial TA 2019} - \text{Belanja Bantuan Sosial TA 2018}}{\text{Belanja Bantuan Sosial TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial 2020	=	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial TA 2020} - \text{Belanja Bantuan Sosial TA 2019}}{\text{Belanja Bantuan Sosial TA 2019}}$	x 100%

h) Belanja Modal

Analisis tingkat pertumbuhan belanja modal bertujuan untuk mengetahui tingkat pengeluaran pemda atas belanja modal. Pertumbuhan belanja modal dipengaruhi antara lain oleh kemampuan keuangan daerah, prioritas pengeluaran pemda dan kebijakan pengelolaan aset pemda. Rumus perhitungannya adalah:

Pertumbuhan Belanja Modal 2019	=	$\frac{\text{Belanja Modal TA 2019} - \text{Belanja Modal TA 2018}}{\text{Belanja Modal TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan Belanja Modal 2020	=	$\frac{\text{Belanja Modal TA 2020} - \text{Belanja Modal TA 2019}}{\text{Belanja Modal TA 2019}}$	x 100%

i) SiLPA

Analisis tingkat fluktuasi SiLPA bertujuan untuk mengetahui tingkat dana yang tidak terpakai di akhir tahun berjalan. Rumus perhitungannya adalah:

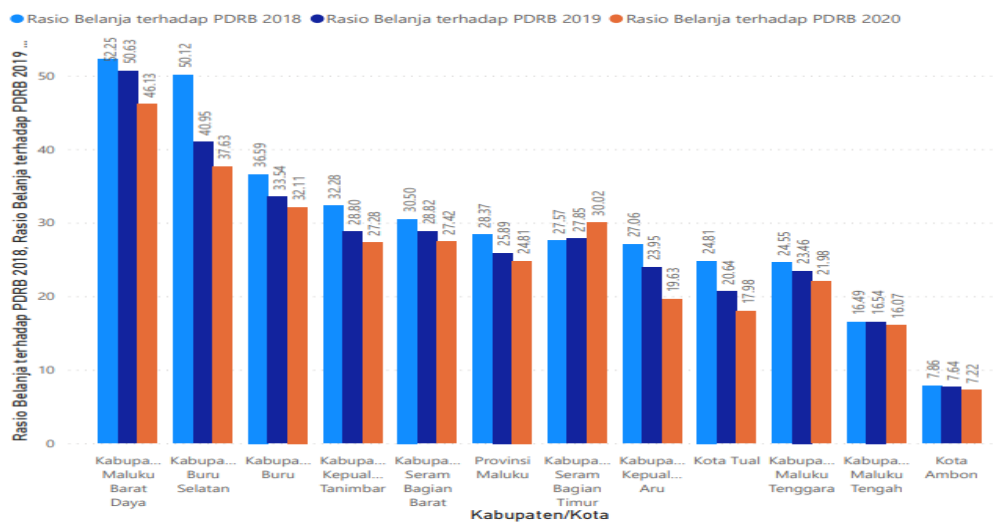
Pertumbuhan SiLPA 2019	=	$\frac{\text{SiLPATA 2019} - \text{SiLPAI TA 2018}}{\text{SiLPA TA 2018}}$	x 100%
Pertumbuhan SiLPA 2020	=	$\frac{\text{SiLPA TA 2020} - \text{SiLPA TA 2019}}{\text{SiLPA TA 2019}}$	x 100%

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1. Analisis Keuangan dengan Pendekatan Arah Pencapaian Tujuan Pemerintah

a. Analisis Rasio Belanja terhadap PDRB

Rata-rata rasio belanja daerah terhadap PDRB untuk wilayah Provinsi Maluku Tahun 2018 adalah 28,37%, Tahun 2019 adalah 25,89% dan Tahun 2020 adalah 24,81% dengan rincian sebagai berikut:



Kabupaten/Kota	Rasio Belanja terhadap PDRB 2018	Rasio Belanja terhadap PDRB 2019	Rasio Belanja terhadap PDRB 2020
Provinsi Maluku	28.37	25.89	24.81
Kota Tual	24.81	20.64	17.98
Kota Ambon	7.86	7.64	7.22
Kabupaten Seram Bagian Timur	27.57	27.85	30.02
Kabupaten Seram Bagian Barat	30.50	28.82	27.42
Kabupaten Maluku Tenggara	24.55	23.46	21.98
Kabupaten Maluku Tengah	16.49	16.54	16.07
Kabupaten Maluku Barat Daya	52.25	50.63	46.13
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	32.28	28.80	27.28
Kabupaten Kepulauan Aru	27.06	23.95	19.63
Kabupaten Buru Selatan	50.12	40.95	37.63
Kabupaten Buru	36.59	33.54	32.11

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

1) Terdapat lima pemda yang rasio belanja daerah terhadap PDRB tahun 2020 diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Seram Bagian Barat

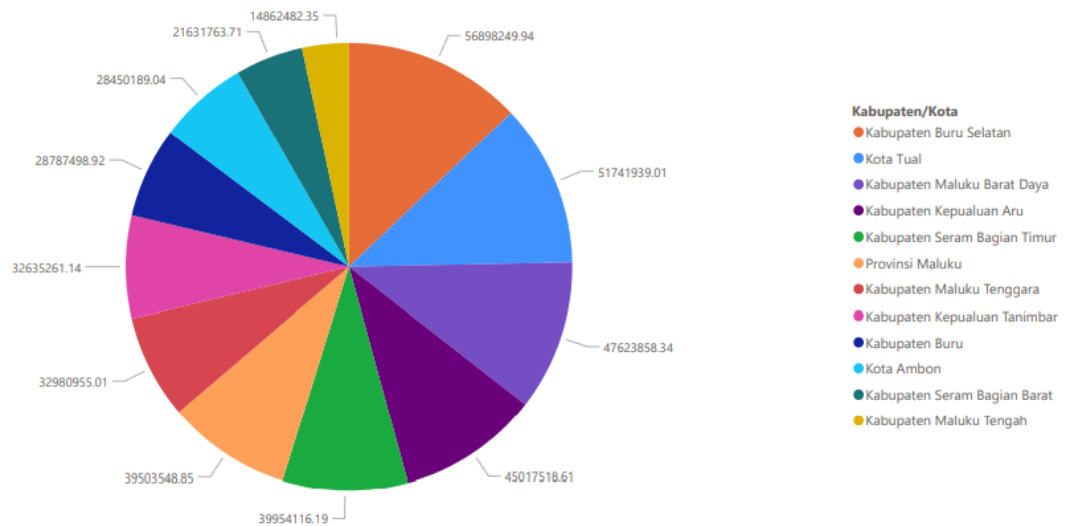
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut semakin bergantung pada belanja pemerintah daerah. Hal ini, mengindikasikan sektor swasta kurang memiliki peran yang besar dalam perekonomian di daerah tersebut.

2) Rasio belanja daerah terhadap PDRB pada tahun 2020 dibanding tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan (kecuali Kabupaten Seram Bagian Timur) yang mengindikasikan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap PDRB makin berkurang.

b. Analisis Rasio Balanja Nonpegawai terhadap Tingkat Kemiskinan

1) Rata-rata rasio belanja nonpegawai per penduduk miskin tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Maluku adalah Rp39.503.548.85/jiwa dengan rincian sebagai berikut:

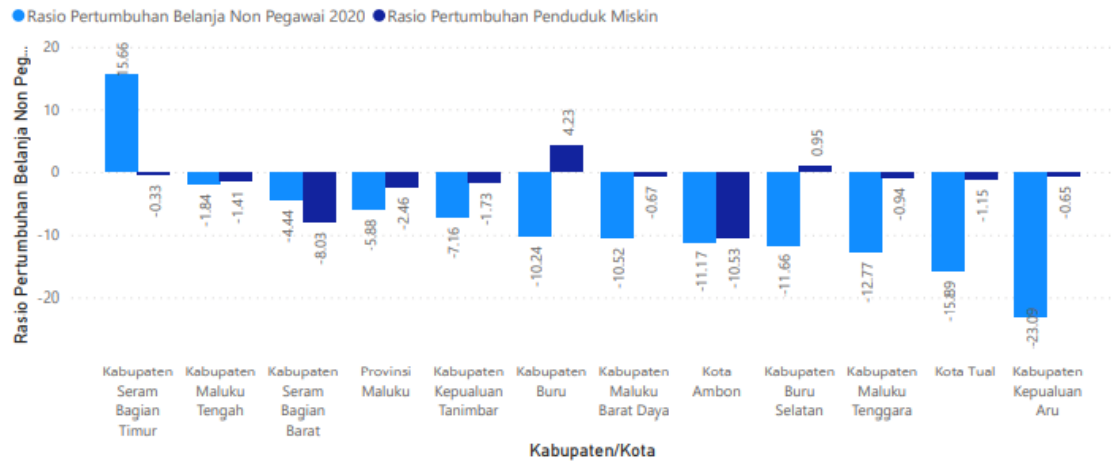
Rasio Belanja Non Pegawai per Penduduk Miskin 2020 by Kabupaten/Kota



Dari diagram diatas menunjukkan bahwa rasio belanja nonpegawai per penduduk miskin tahun 2020 per Kabupaten/Kota dibandingkan dengan rasio belanja nonpegawai per penduduk miskin tahun 2020 wilayah Provinsi Maluku, terdapat enam pemda yang rasio belanja nonpegawai per penduduk miskin tahun 2020 di bawah rata-rata wilayah Provinsi Maluku adalah:

- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Buru
- Kota Ambon
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Maluku Tengah

2) Rata-rata pertumbuhan total belanja nonpegawai tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Maluku adalah -5,88% dan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Maluku adalah sebesar -2,40% dengan rincian sebagai berikut:



Kabupaten/Kota	Rasio Belanja Non Pegawai per Penduduk Miskin 2020	Rasio Pertumbuhan Belanja Non Pegawai 2020	Rasio Pertumbuhan Penduduk Miskin	Korelasi
Provinsi Maluku	39,503,548.85	-5.88	-2.46	Tidak
Kota Tual	51,741,939.01	-15.89	-1.15	Tidak
Kota Ambon	28,450,189.04	-11.17	-10.53	Tidak
Kabupaten Seram Bagian Timur	39,954,116.19	15.66	-0.33	Ya
Kabupaten Seram Bagian Barat	21,631,763.71	-4.44	-8.03	Tidak
Kabupaten Maluku Tenggara	32,980,955.01	-12.77	-0.94	Tidak
Kabupaten Maluku Tengah	14,862,482.35	-1.84	-1.41	Tidak
Kabupaten Maluku Barat Daya	47,623,858.34	-10.52	-0.67	Tidak
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	32,635,261.14	-7.16	-1.73	Tidak
Kabupaten Kepulauan Aru	45,017,518.61	-23.09	-0.65	Tidak
Kabupaten Buru Selatan	56,898,249.94	-11.66	0.95	Tidak
Kabupaten Buru	28,787,498.92	-10.24	4.23	Tidak

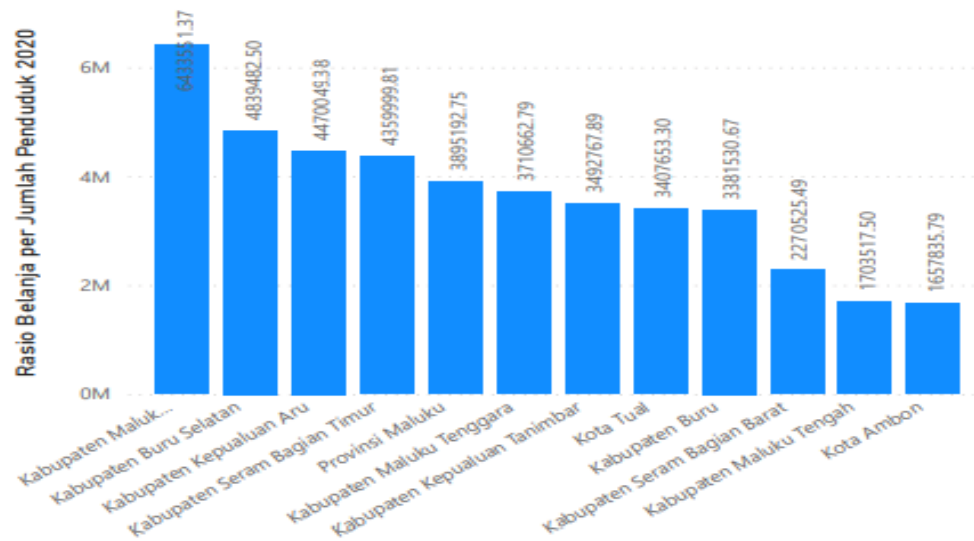
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa

- Rasio belanja nonpegawai per penduduk miskin tahun 2020 di wilayah Provinsi Maluku hampir seluruhnya menunjukkan hasil negatif kecuali Kabupaten Seram Bagian Barat
- Terdapat tiga pemda yang mengalami pertumbuhan rasio penduduk miskin yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

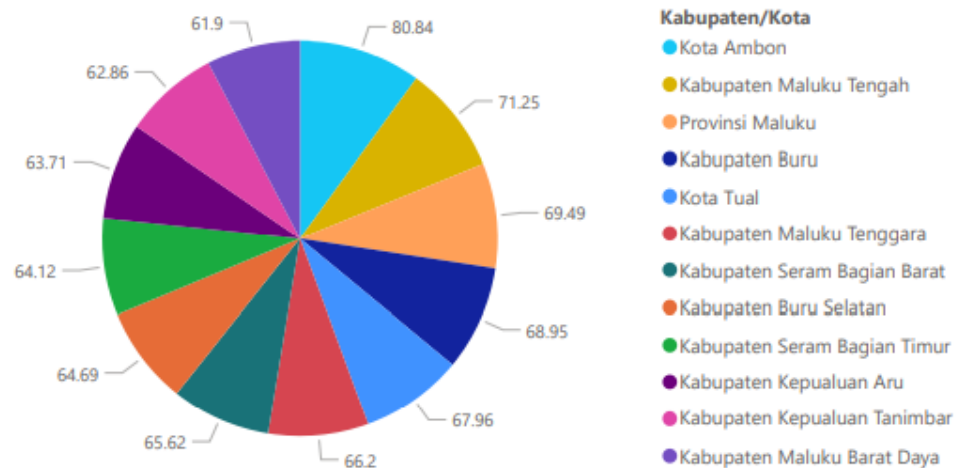
Dari analisis diatas dapat disimpulkan hanya Kabupaten Seram Bagian Timur yang rasio belanja nonpegawai tahun 2020 yang berkorelasi atau sejalan dengan pertumbuhan belanja nonpegawai dan penurunan kemiskinan.

- c. Analisis Rasio Belanja Nonpegawai terhadap Jumlah Penduduk
- Rata-rata rasio belanja nonpegawai per penduduk untuk wilayah Provinsi Maluku tahun 2020 adalah Rp363.523.077,06/jiwa dan jika dibandingkan dengan IPM maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Rasio Belanja per Jumlah Penduduk 2020 by Kabupaten/Kota



IPM 2020 by Kabupaten/Kota



Kabupaten/Kota	Rasio Belanja per Jumlah Penduduk 2020	IPM 2020	Kategori IPM	Efisien
Kabupaten Buru	3,381,530.67	68.95	Sedang	Tidak
Kabupaten Buru Selatan	4,839,482.50	64.69	Sedang	Tidak
Kabupaten Kepulauan Aru	4,470,049.38	63.71	Sedang	Tidak
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3,492,767.89	62.86	Sedang	Tidak
Kabupaten Maluku Barat Daya	6,433,551.37	61.90	Sedang	Tidak
Kabupaten Maluku Tengah	1,703,517.50	71.25	Tinggi	Ya
Kabupaten Maluku Tenggara	3,710,662.79	66.20	Sedang	Tidak
Kabupaten Seram Bagian Barat	2,270,525.49	65.62	Sedang	Tidak
Kabupaten Seram Bagian Timur	4,359,999.81	64.12	Sedang	Tidak
Kota Ambon	1,657,835.79	80.84	Sangat Tinggi	Ya
Kota Tual	3,407,653.30	67.96	Sedang	Tidak
Provinsi Maluku	3,895,192.75	69.49	Sedang	Tidak

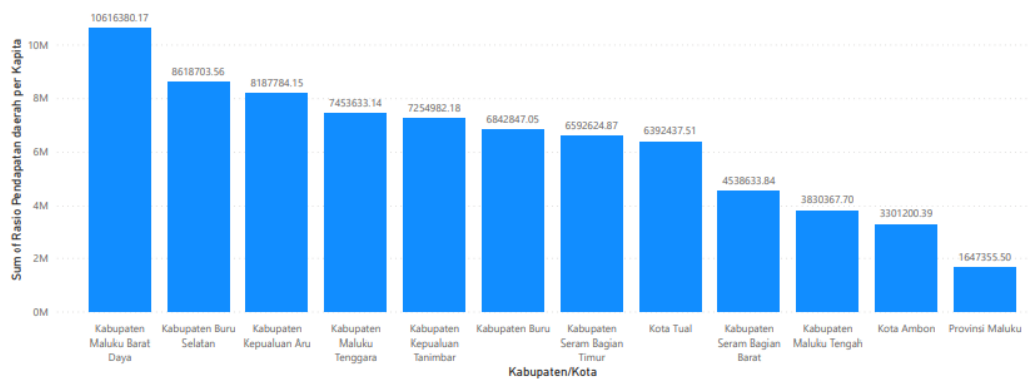
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemda yang paling efektif dalam mengalokasikan belanja daerah adalah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai rasio belanja nonpegawai per penduduk untuk wilayah Provinsi terendah tetapi mempunyai IPM yang tinggi.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

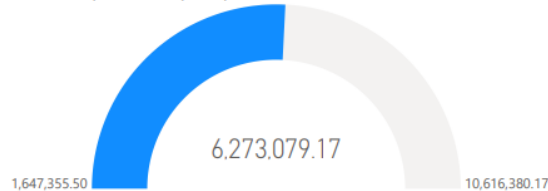
a. Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

1) Rasio Total Pendapatan Daerah per Kapita Tahun 2020

Sum of Rasio Pendapatan daerah per Kapita by Kabupaten/Kota



Average of Rasio Pendapatan daerah per Kapita



Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio total pendapatan daerah per kapita diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

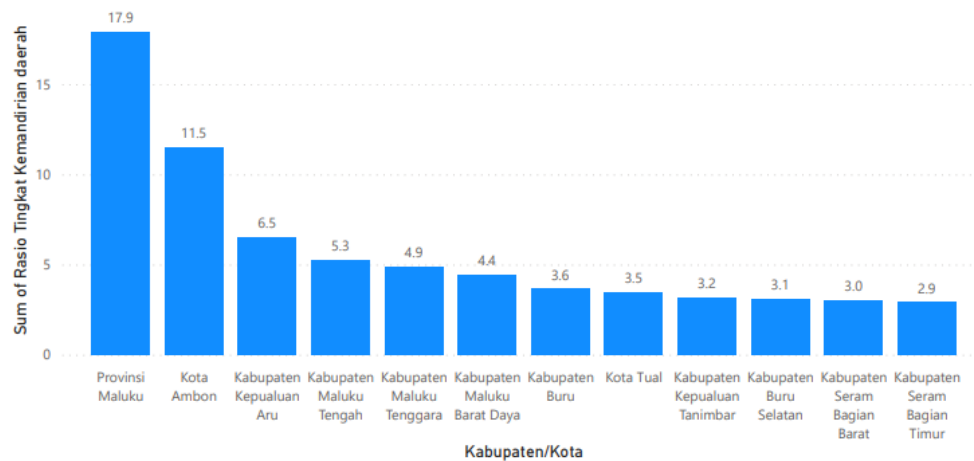
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Maluku Tenggara

- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kota Tual

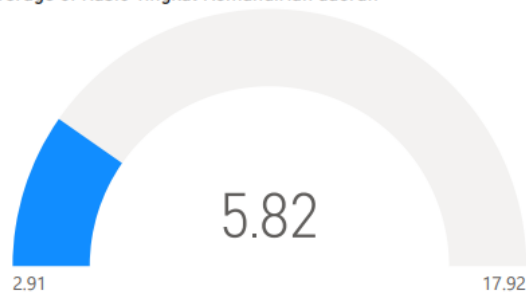
Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar juga beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2) Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Tahun 2020

Sum of Rasio Tingkat Kemandirian daerah by Kabupaten/Kota



Average of Rasio Tingkat Kemandirian daerah



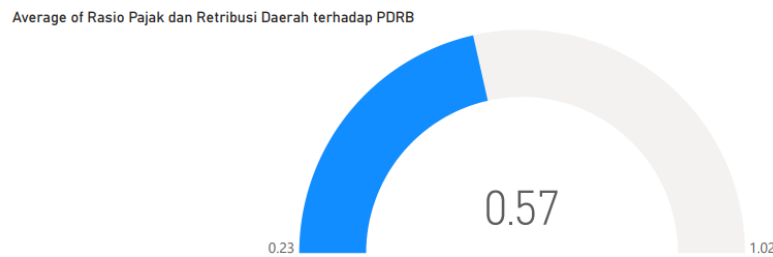
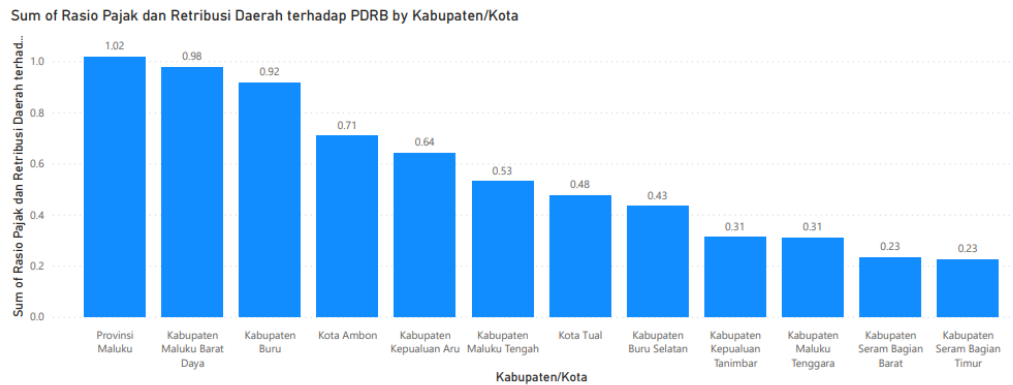
Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio tingkat kemandirian daerah diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Provinsi Maluku
- Kota Ambon
- Kabupaten Kepulauan Aru

Tingkat kemandirian pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku masih sangat rendah sekali. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjadi rentan terhadap kebijakan-kabijakan pemerintah pusat terkait dana transfer. Selain itu, kemampuan

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah serta kemampuan PAD yang masih rendah.

3) Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Tahun 2020

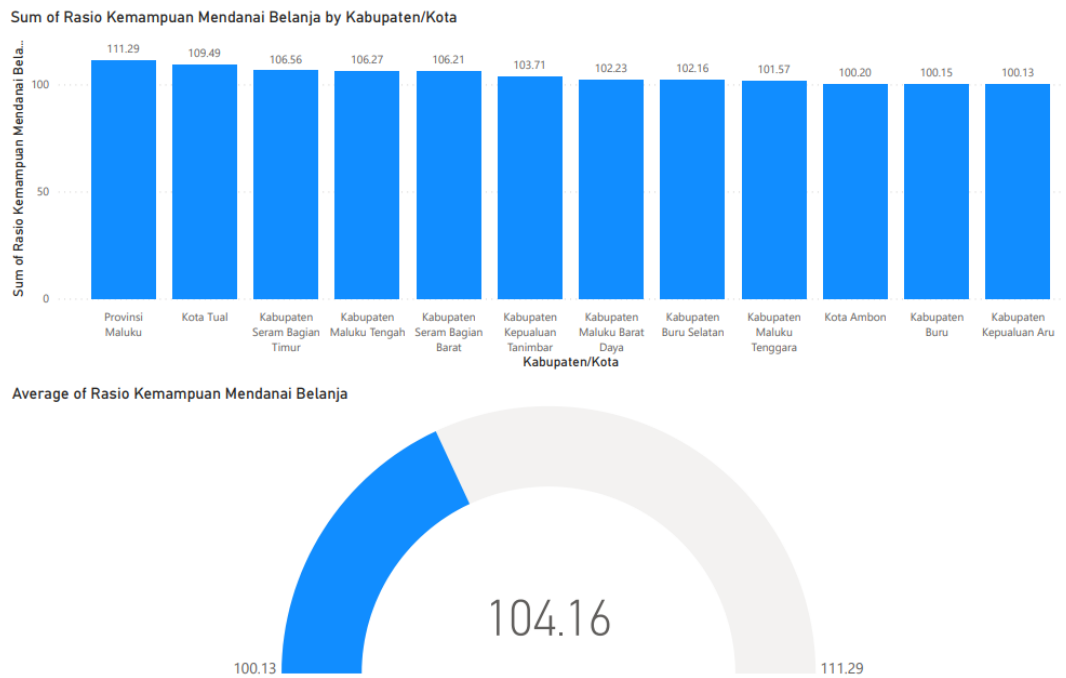


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Provinsi Maluku
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Buru
- Kota Ambon
- Kabupaten Kepulauan Aru

Semakin besar rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB, maka kemampuan daerah dalam mengoversi seluruh potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar.

4) Rasio Kemampuan Mendanai Belanja dan Pengeluaran Daerah Tahun 2020

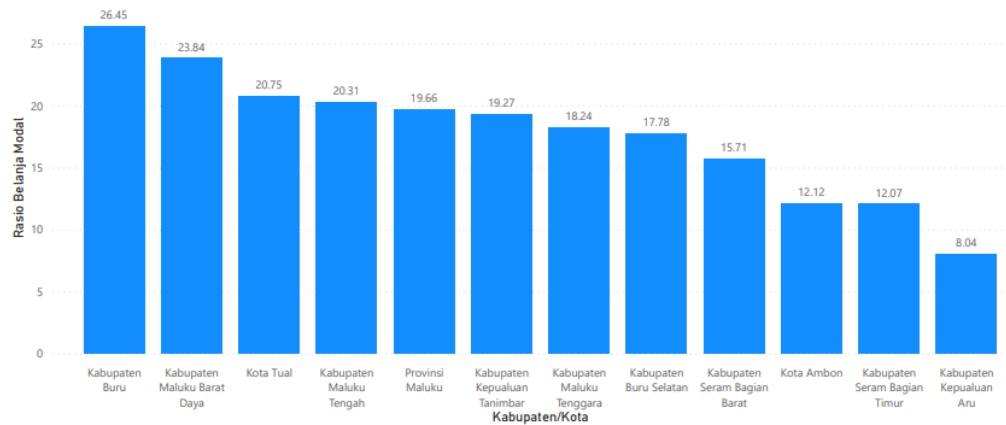


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio kemampuan mendanai belanja dan pengeluaran daerah diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

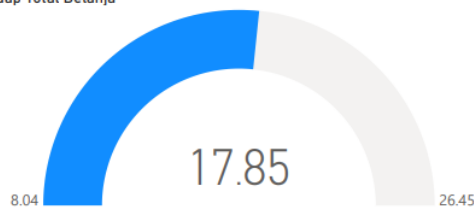
- Provinsi Maluku
- Kota Tual
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah terhadap belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka kemampuan untuk membiayai belanja daerah semakin besar.

5) Rasio Belanja Modal Tahun 2020



Average of Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

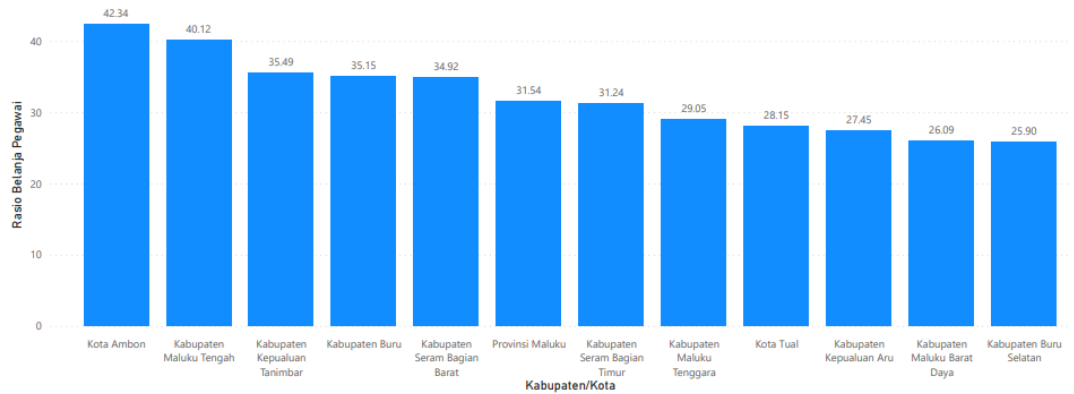


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio belanja modal diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

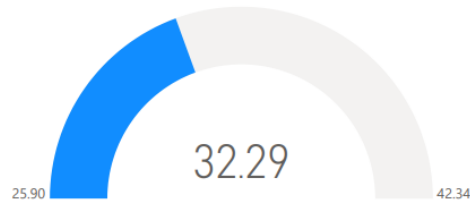
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Provinsi Maluku
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Maluku Tenggara

Dari analisis diatas menunjukkan rasio belanja modal pada beberapa pemda masih rendah. Hal ini mengindikasikan belanja modal yang rendah tidak dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akibatnya akan mengganggu potensi pelayanan pemerintah daerah.

6) Rasio Belanja Pegawai Tahun 2020



Average of Rasio Belanja Pegawai



Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio belanja pegawai dibawah rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Provinsi Maluku
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kota Tual
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Buru Selatan

Semakin kecil rasio ini maka menunjukkan kualitas belanja yang lebih baik karena akan dialokasikan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang langsung terkait dengan pelayanan public

7) Rasio Optimalisasi SiLPA Tahun 2020



Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio optimalisasi SiLPA diatas rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Provinsi Maluku
- Kota Tual
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat

Semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga semakin besar.

8) Rasio Kemampuan Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020



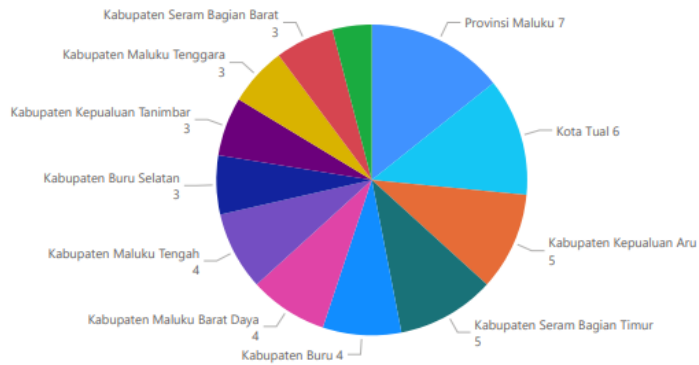
Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang rasio kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek dibawah rata-rata wilayah Provinsi Maluku yaitu:

- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Buru
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Provinsi Maluku
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Seram Bagian Timur

Semakin kecil rasio pembayaran kewajiban jangka pendek terhadap kas dan setara kas, maka daerah semakin mampu untuk menjamin pengembalian utang jangka pendeknya.

Secara umum hasil analisis kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah by Kabupaten/Kota

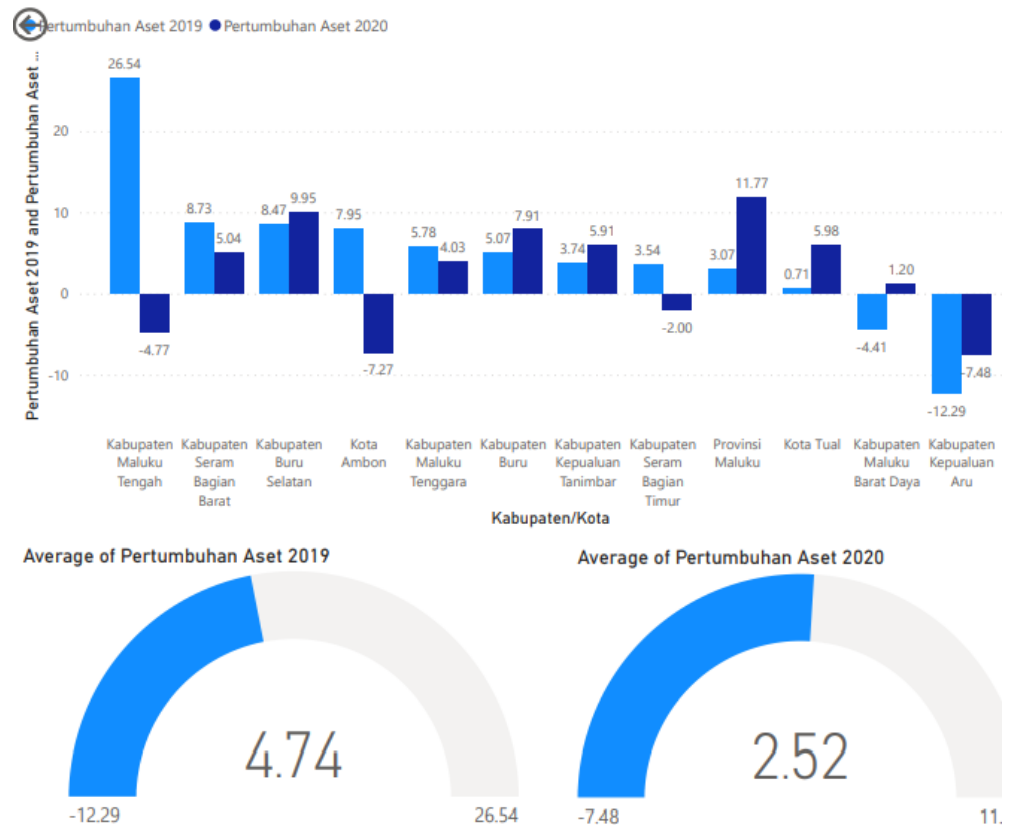


Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan daerah per Kapita	Rasio Tingkat Kemandirian daerah	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja	Rasio Belanja Modal	Rasio Belanja Pegawai	Rasio Optimalisasi SILPA	Current Ratio	Jumlah
Kabupaten Buru	1	0	1	0	1	0	0	1	4
Kabupaten Kepulauan Aru	1	1	1	0	0	1	0	1	5
Kabupaten Maluku Barat Daya	1	0	1	0	1	1	0	0	4
Kota Ambon	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Provinsi Maluku	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Kabupaten Buru Selatan	1	0	0	0	0	1	0	1	3
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	0	0	0	1	0	0	1	3
Kabupaten Maluku Tengah	0	0	0	1	1	0	1	1	4
Kabupaten Maluku Tenggara	1	0	0	0	1	1	0	0	3
Kabupaten Seram Bagian Barat	0	0	0	1	0	0	1	1	3
Kabupaten Seram Bagian Timur	1	0	0	1	0	1	1	1	5
Kota Tual	1	0	0	1	1	1	1	1	6
Total	8	3	5	5	7	7	5	9	49

b. Rasio Perumbuhan Neraca dan LRA Tahun 2018-2020

1) Analisis atas Neraca

a) Total Aset

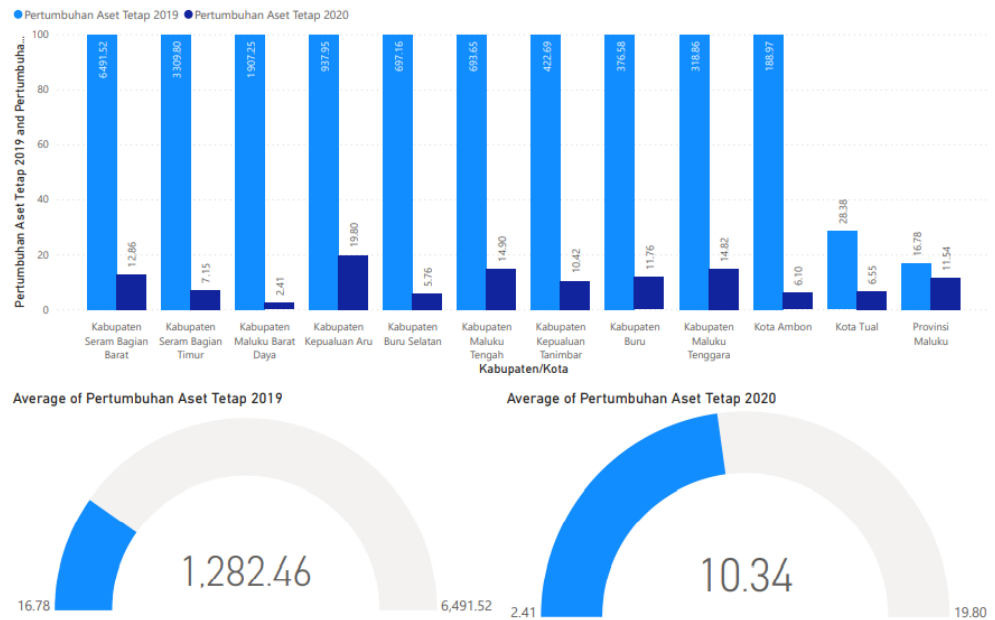


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang kenaikan pertumbuhan total aset selama tiga periode berurutan yang mengalami peningkatan yaitu:

- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Provinsi Maluku
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Kepulauan Aru

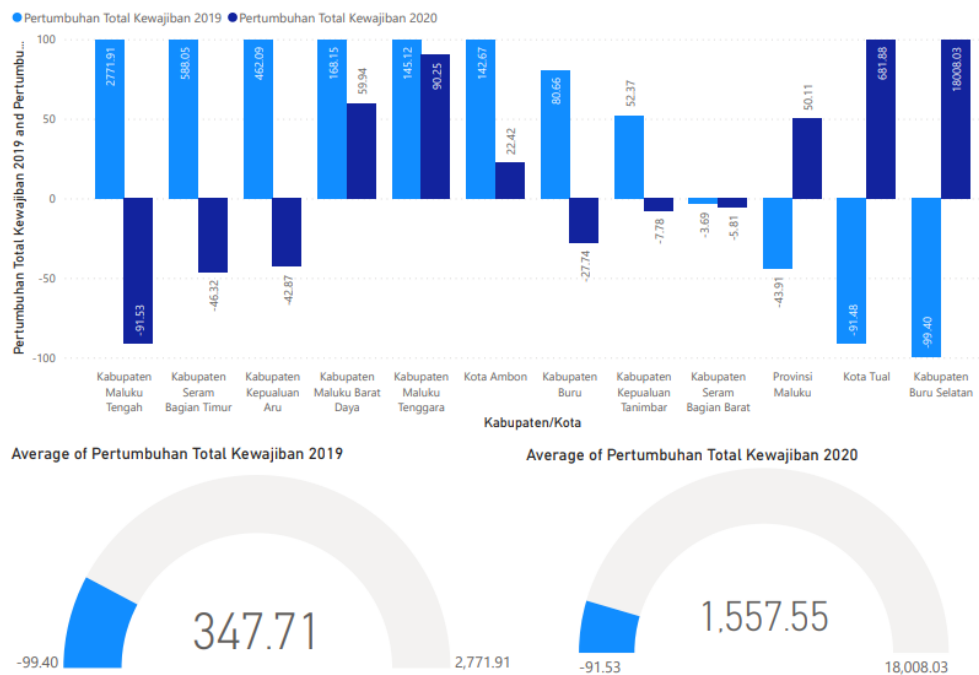
Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan total aset mengalami penurunan. Penurunan aset bisa menandakan adanya kemunduran, penurunan nilai aset ataupun inefisiensi dalam pengelolaan aset.

b) Aset Tetap



Dari hasil analisis diatas tidak terdapat pemda yang mengalami pertumbuhan aset tetap selama tiga periode berurutan. Penurunan nilai aset tetap antara lain menunjukkan adanya penyusutan aset tetap dan pelepasan aset tetap berupa penjualan atau penghapusan aset tetap.

c) Total Kewajiban



Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami penurunan pertumbuhan total kewajiban selama tiga periode berurutan yang mengalami peningkatan yaitu:

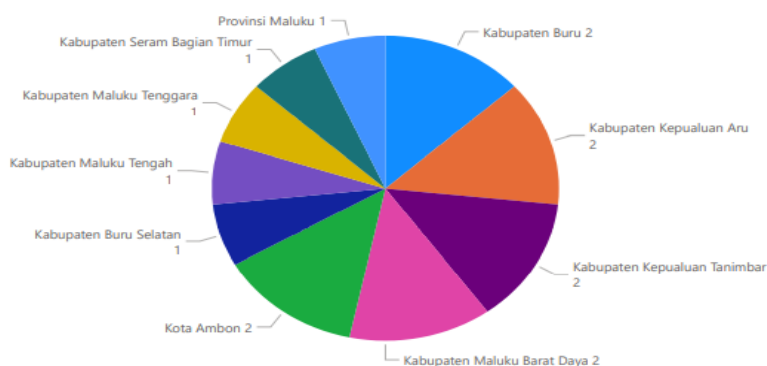
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kota Ambon
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Penurunan nilai kewajiban menunjukkan adanya pelunasan atau penghapusan utang

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan total kewajiban mengalami Kenaikan. Kenaikan nilai kewajiban antara lain menunjukkan adanya penambahan utang atau timbulnya utang yang baru.

Secara umum hasil analisis pertumbuhan neraca tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

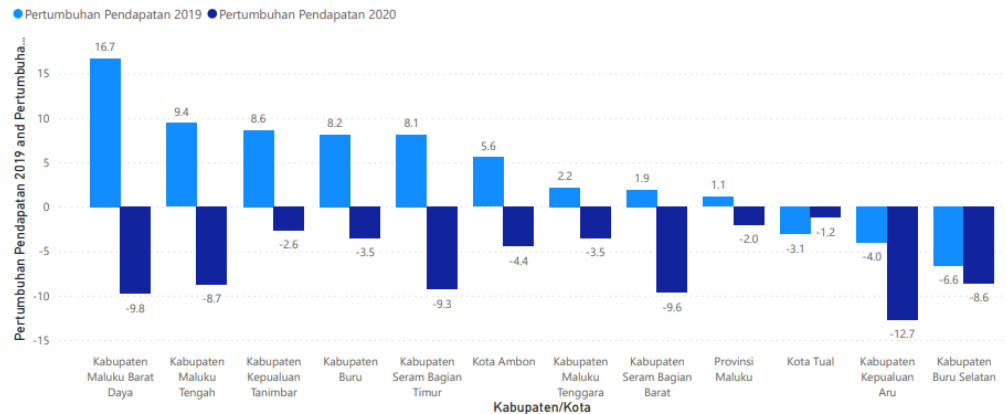
Jumlah by Kabupaten/Kota



Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Aset	Pertumbuhan Aset Tetap	Pertumbuhan Total Kewajiban	Jumlah
Kabupaten Buru	1	0	1	2
Kabupaten Buru Selatan	1	0	0	1
Kabupaten Kepulauan Aru	1	0	1	2
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	0	1	2
Kabupaten Maluku Barat Daya	1	0	1	2
Kota Ambon	1	0	1	2
Provinsi Maluku	1	0	0	1
Kabupaten Maluku Tengah	0	0	1	1
Kabupaten Maluku Tenggara	0	0	1	1
Kabupaten Seram Bagian Barat	0	0	0	0
Kabupaten Seram Bagian Timur	0	0	1	1
Kota Tual	0	0	0	0
Total	7	0	8	15

2) Analisis atas LRA

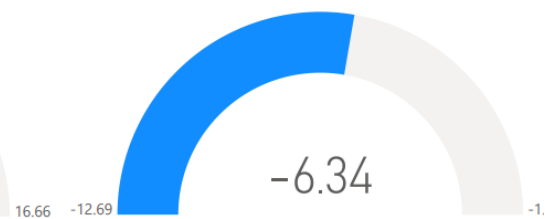
a) Total Pendapatan



Average of Pertumbuhan Pendapatan 2019

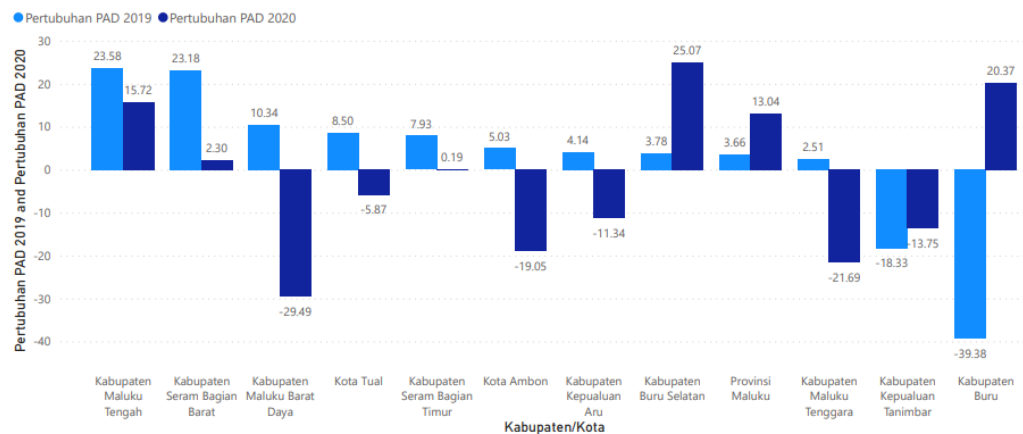


Average of Pertumbuhan Pendapatan 2020

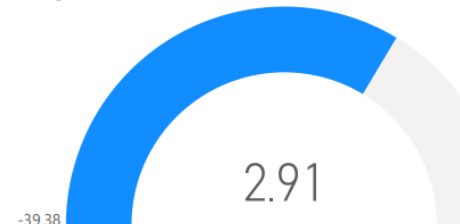


Dari hasil analisis diatas tidak terdapat pemda yang mengalami pertumbuhan pendapatan selama tiga periode berurutan. Fluktuasi total pendapatan antara lain disebabkan faktor intern yaitu kurangnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional

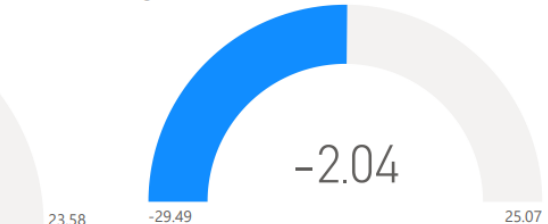
b) PAD



Average of Pertumbuhan PAD 2019



Average of Pertumbuhan PAD 2020

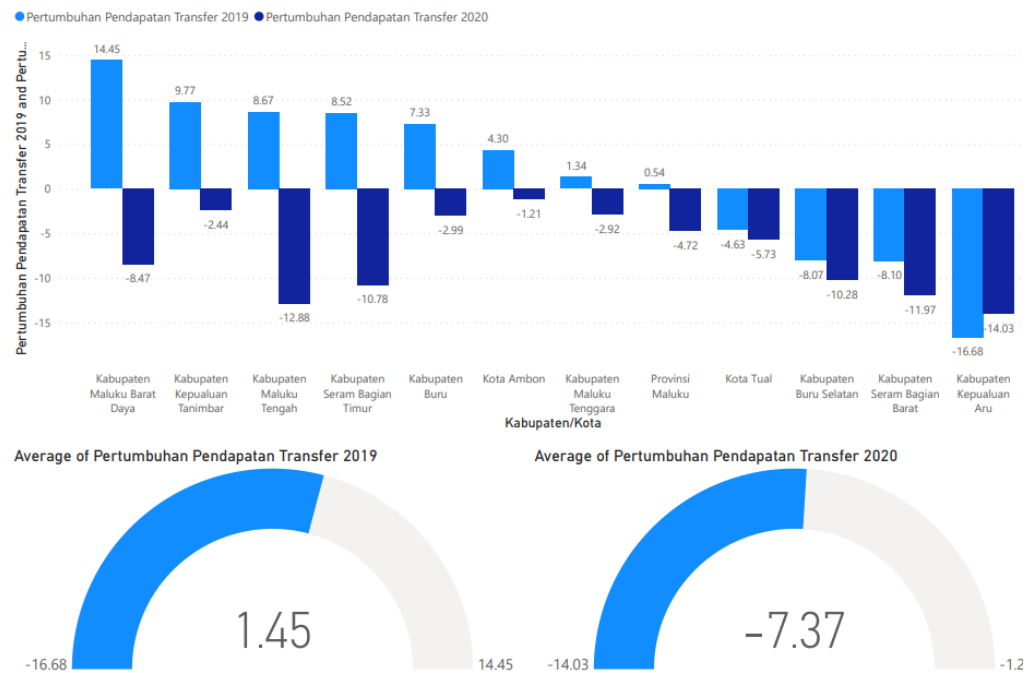


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan PAD selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Buru Selatan
- Provinsi Maluku
- Kabupaten Buru

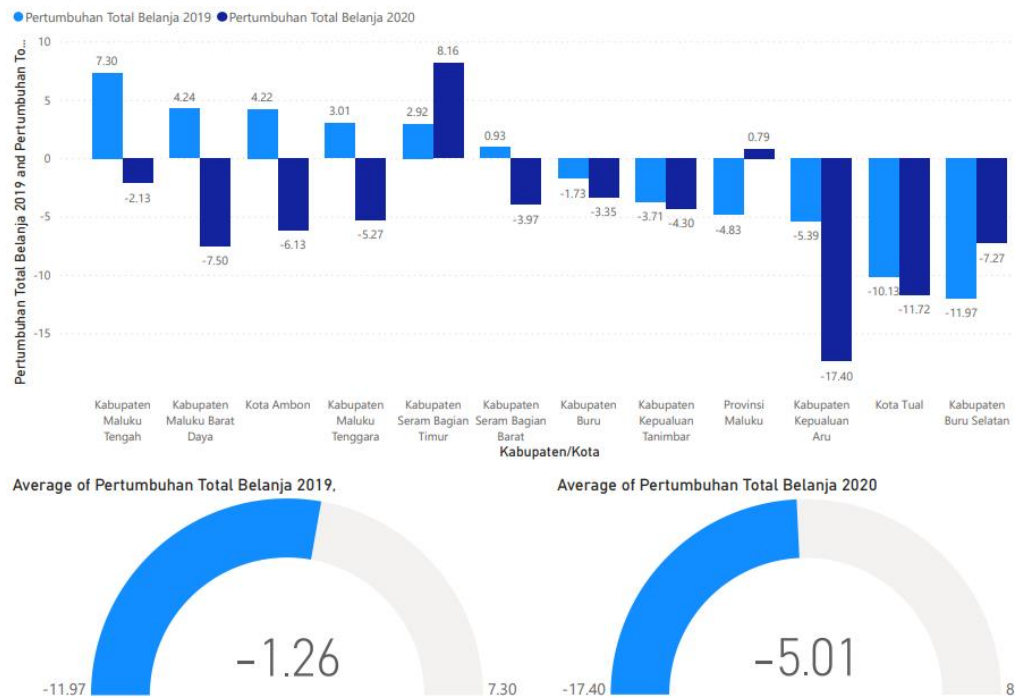
Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Fluktuasi PAD antara lain disebabkan faktor intern yaitu kurangnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, dan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional.

c) Pendapatan Transfer



Dari hasil analisis diatas tidak terdapat pemda yang mengalami pertumbuhan pendapatan traselama tiga periode berurutan. Hal ini disebabkan faktor ekstern yaitu perkembangan makro ekonomi dan kebijakan nasional.

d) Total Belanja

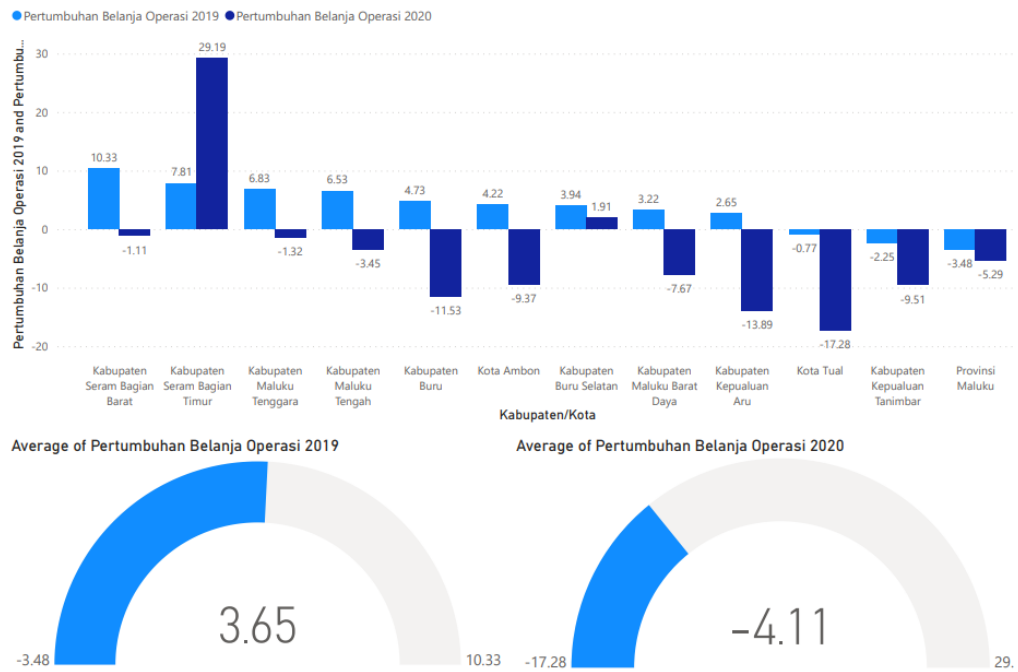


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan total belanja selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Provinsi Maluku

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan total belanja mengalami penurunan. Fluktuasi total belanja dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jenis-jenis belanja antara lain belanja operasi dan belanja modal.

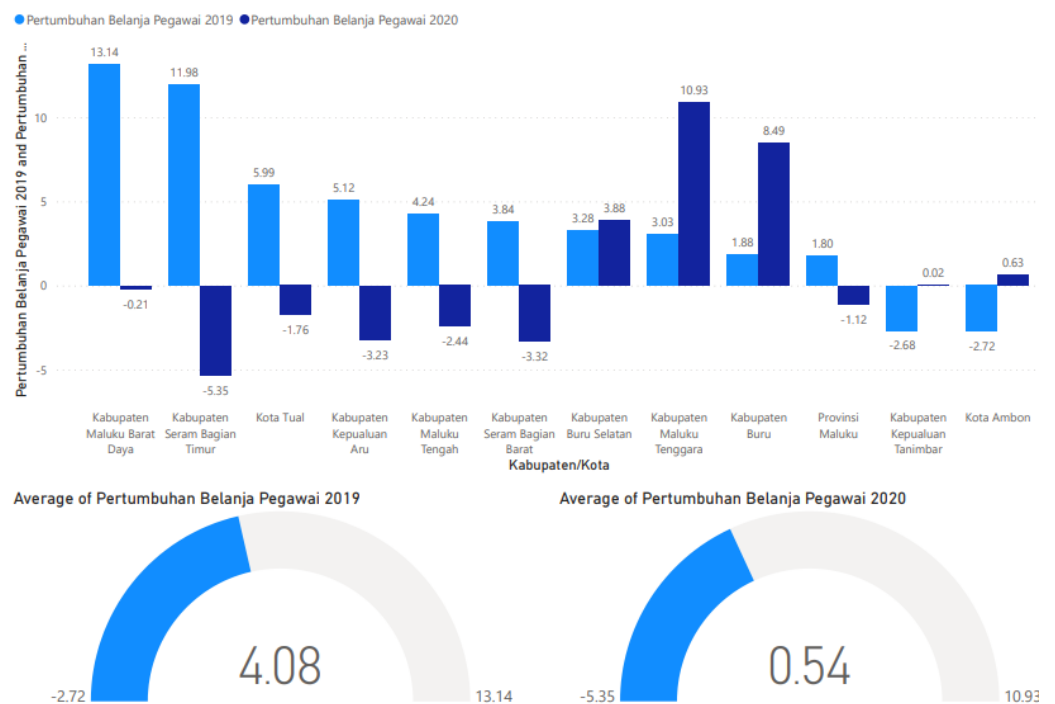
e) Belanja Operasi



Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan belanja operasi selama tiga periode berurutan yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan belanja operasi mengalami penurunan.

f) Belanja Pegawai

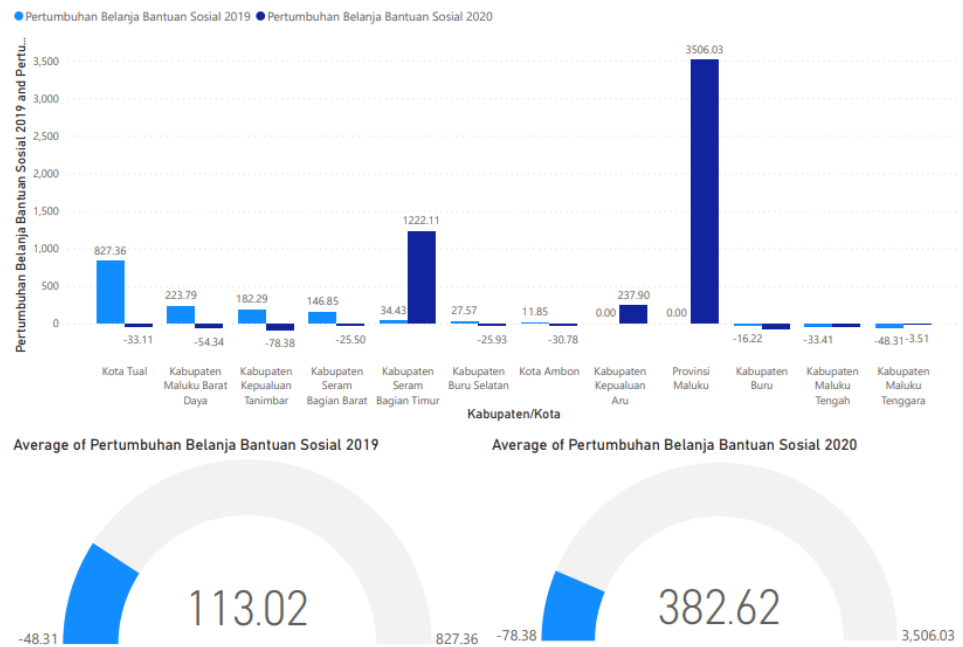


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan belanja pegawai selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kabupaten Buru
- Kota Ambon

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan belanja pegawai mengalami penurunan.

g) Belanja Bantuan Sosial

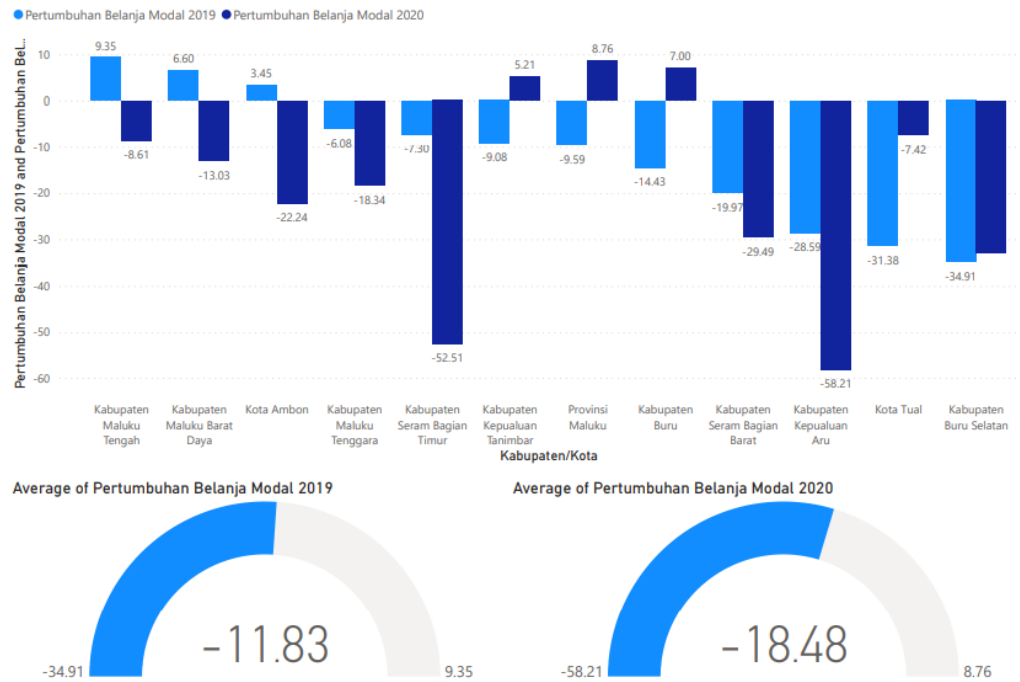


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan belanja bantuan sosial selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Provinsi Maluku
- Kabupaten Maluku Tenggara

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan belanja modal mengalami kenaikan.

h) Belanja Modal

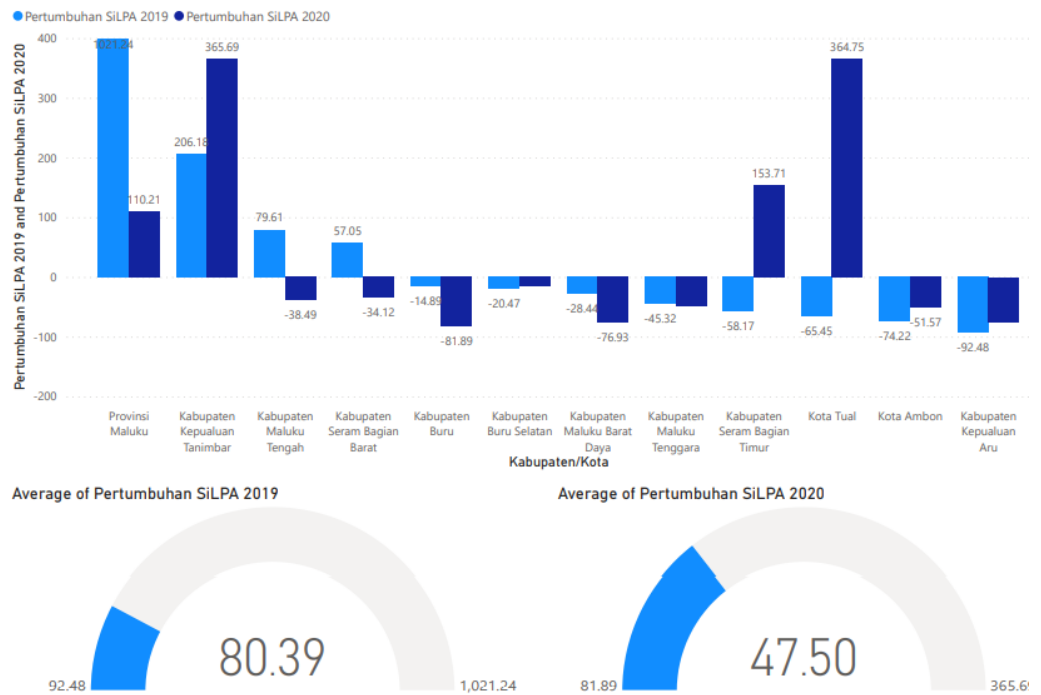


Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan belanja modal selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Provinsi Maluku
- Kabupaten Buru
- Kota Tual
- Kabupaten Buru Selatan

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan belanja modal mengalami penurunan.

i) SiLPA



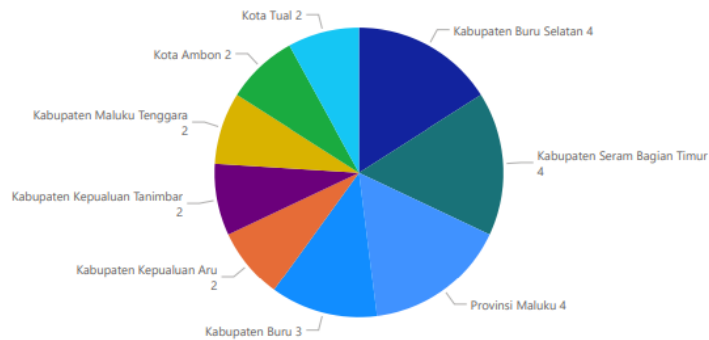
Dari hasil analisis diatas terdapat pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan SiLPA selama tiga periode berurutan yaitu:

- Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kota Tual
- Kota Ambon
- Kabupaten Kepulauan Aru

Secara keseluruhan pada wilayah Provinsi Maluku rata-rata pertumbuhan SiLPA mengalami penurunan.

Secara umum hasil analisis pertumbuhan LRA tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah by Kabupaten/Kota



Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pendapatan	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan Pendapatan Transfer	Pertumbuhan Total Belanja	Pertumbuhan Belanja Operasi	Pertumbuhan Belanja Pegawai	Pertumbuhan Bantuan Sosial	Pertumbuhan Belanja Modal	Pertumbuhan SilPA	Jumlah
Kabupaten Buru	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Kabupaten Buru Selatan	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4
Kabupaten Maluku Tenggara	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Kota Ambon	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Kabupaten Kepulauan Aru	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Kabupaten Maluku Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Maluku Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Seram Bagian Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Seram Bagian Timur	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4
Kota Tual	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Provinsi Maluku	0	1	0	1	0	0	1	1	0	4
Total	0	3	0	2	1	4	4	5	6	25

BAB III

Penutup

A. Simpulan

Hasil analisis kinerja keuangan pemda se-wilayah Provinsi Maluku Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Arah Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Dari hasil analisis rasio belanja daerah terhadap PDRB dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis rasio belanja daerah terhadap PDRB pada tahun 2020 dibanding tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan (kecuali Kabupaten Seram Bagian Timur) yang mengindikasikan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap PDRB makin berkurang.

Selain itu, sebagian pemerintah daerah menunjukkan perekonomian daerahnya masih bergantung pada belanja pemerintah daerah. Hal ini, mengindikasikan sektor swasta kurang memiliki peran yang besar dalam perekonomian di daerah tersebut.

- b. Hasil analisis rasio belanja nonpegawai terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan hanya Kabupaten Seram Bagian Timur yang rasio belanja nonpegawai tahun 2020 yang berkorelasi atau sejalan dengan pertumbuhan belanja nonpegawai dan penurunan kemiskinan.
- c. Hasil analisis rasio belanja nonpegawai terhadap jumlah penduduk menunjukkan bahwa pemda yang paling efektif dalam mengalokasikan belanja daerah adalah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dimana pemda tersebut mempunyai rasio belanja nonpegawai per penduduk untuk wilayah Provinsi terendah tetapi mempunyai IPM yang tinggi.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Hasil analisis pada delapan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2020 didapatkan pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang baik secara berurutan yaitu:

- 1) Provinsi Maluku

- 2) Kota Tual
- 3) Kabupaten Kepulauan Aru
- 4) Kabupaten Seram Bagian Timur
- 5) Kabupaten Buru
- 6) Kabupaten Maluku Barat Daya
- 7) Kabupaten Maluku Tengah
- 8) Kabupaten Buru Selatan
- 9) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 10) Kabupaten Maluku Tenggara
- 11) Kabupaten Seram Bagian Barat
- 12) Kota Ambon

b. Analisis LKPD atas Pertumbuhan Neraca Tahun 2020

Hasil analisis pertumbuhan neraca tahun 2020 untuk pemerintah daerah se-wilayah Provinsi Maluku menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan aset dan kewajiban, sedangkan aset tetap mengalami penurunan

c. Analisis LKPD atas Pertumbuhan LRA Tahun 2020

Hasil analisis pertumbuhan LRA tahun 2020 untuk pemerintah daerah se-wilayah Provinsi Maluku secara umum mengalami tren penurunan total pendapatan, pendapatan transfer, PAD, total belanja, belanja operasi, belanja pegawai.

B. Saran

1. Analisis Arah Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah Tahun 2020

- a. Mengingatkan daerah khususnya daerah dengan rata-rata rasio belanja daerah terhadap PDRB yang tinggi untuk membuat kebijakan guna mendorong iklim investasi yang dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi.
- b. Melakukan evaluasi pada pemerintah daerah yang belanjanya tidak berkolerasi dengan angka kemiskinan, berupa penilaian ketepatan belanja pemerintah, pemilihan program, sasaran maupun alokasinya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan.
- c. Melakukan evaluasi pada pemerintah daerah yang dianggap kurang efisien, berupa meninjau kembali alokasi belanjanya apakah sudah mengarah pada upaya perbaikan kualitas hidup masyarakatnya.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah daerah melakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 - b. Pemerintah daerah melakukan optimalisasi aset tetap untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar.
 - c. Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan aset, rehabilitasi aset dan penghapusan atas aset tetap yang membebani anggaran daerah.